



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125/PMK.07/2016
TENTANG
PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian belanja negara dalam hal

- realisasi penerimaan negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara;
- d. bahwa Dana Alokasi Umum yang berfungsi untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan bagian dari belanja negara sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, antara lain telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat melakukan penundaan penyaluran sebagian Transfer ke Daerah dan diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan negara;
 - g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dan dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);



7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, terhadap penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 untuk 169 (seratus enam puluh sembilan) daerah sebesar Rp19.418.975.064.500,00 (sembilan belas triliun empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dilakukan penundaan.
- (2) Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang.
- (3) Rincian daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Dana Alokasi Umum yang sebagian penyalurannya ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2016 dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi.

H

- (2) Penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk sebagian atau seluruh Dana Alokasi Umum sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2016.
- (3) Dalam hal penyaluran kembali sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2016, Dana Alokasi Umum yang penyalurannya ditunda, diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 3

Berdasarkan penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Dana Alokasi Umum pada pendapatan dan belanja tanpa menunggu Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1203

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125/PMK.07/2016
TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA
ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TAHUN ANGGARAN 2016

(rupiah)

No.	Nama Daerah	Penundaan DAU Bulan September	Penundaan DAU Bulan Oktober	Penundaan DAU Bulan November	Penundaan DAU Bulan Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Aceh Besar	19.573.092.076	19.573.092.076	19.573.092.076	19.573.092.076
2	Kab. Aceh Timur	29.459.387.619	29.459.387.619	29.459.387.619	29.459.387.619
3	Kab. Aceh Utara	15.280.298.052	15.280.298.052	15.280.298.052	15.280.298.052
4	Kab. Simeulue	11.937.849.384	11.937.849.384	11.937.849.384	11.937.849.384
5	Prov. Sumatera Utara	72.629.647.740	72.629.647.740	72.629.647.740	72.629.647.740
6	Kab. Asahan	32.271.065.145	32.271.065.145	32.271.065.145	32.271.065.145
7	Kab. Dairi	16.939.525.311	16.939.525.311	16.939.525.311	16.939.525.311
8	Kab. Deli Serdang	54.131.729.191	54.131.729.191	54.131.729.191	54.131.729.191
9	Kab. Karo	20.412.670.697	20.412.670.697	20.412.670.697	20.412.670.697
10	Kab. Langkat	43.472.851.454	43.472.851.454	43.472.851.454	43.472.851.454
11	Kab. Simalungun	33.428.518.346	33.428.518.346	33.428.518.346	33.428.518.346
12	Kab. Toba Samosir	9.740.181.964	9.740.181.964	9.740.181.964	9.740.181.964
13	Kota Pematang Siantar	10.746.753.654	10.746.753.654	10.746.753.654	10.746.753.654
14	Kab. Humbang Hasundutan	19.308.138.938	19.308.138.938	19.308.138.938	19.308.138.938
15	Kab. Samosir	8.320.803.136	8.320.803.136	8.320.803.136	8.320.803.136
16	Kab. Batu Bara	16.655.291.794	16.655.291.794	16.655.291.794	16.655.291.794
17	Kab. Padang Lawas Utara	15.186.127.501	15.186.127.501	15.186.127.501	15.186.127.501
18	Prov. Sumatera Barat	57.121.957.751	57.121.957.751	57.121.957.751	57.121.957.751
19	Kab. Agam	22.488.736.509	22.488.736.509	22.488.736.509	22.488.736.509
20	Kab. Padang Pariaman	14.188.052.224	14.188.052.224	14.188.052.224	14.188.052.224
21	Kota Padang	30.420.045.330	30.420.045.330	30.420.045.330	30.420.045.330
22	Kota Pariaman	7.652.973.452	7.652.973.452	7.652.973.452	7.652.973.452
23	Kab. Pasaman Barat	11.875.188.335	11.875.188.335	11.875.188.335	11.875.188.335
24	Kab. Solok Selatan	8.853.973.404	8.853.973.404	8.853.973.404	8.853.973.404
25	Prov. Riau	33.394.790.346	33.394.790.346	33.394.790.346	33.394.790.346
26	Kab. Indragiri Hilir	24.400.345.554	24.400.345.554	24.400.345.554	24.400.345.554

No.	Nama Daerah	Penundaan DAU Bulan September	Penundaan DAU Bulan Oktober	Penundaan DAU Bulan November	Penundaan DAU Bulan Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Kab. Rokan Hulu	26.118.656.640	26.118.656.640	26.118.656.640	26.118.656.640
28	Prov. Jambi	48.455.164.302	48.455.164.302	48.455.164.302	48.455.164.302
29	Kab. Batanghari	11.061.359.327	11.061.359.327	11.061.359.327	11.061.359.327
30	Kab. Merangin	19.808.240.016	19.808.240.016	19.808.240.016	19.808.240.016
31	Kab. Tanjung Jabung Barat	13.796.558.417	13.796.558.417	13.796.558.417	13.796.558.417
32	Prov. Sumatera Selatan	48.499.022.899	48.499.022.899	48.499.022.899	48.499.022.899
33	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	5.776.927.067	5.776.927.067	5.776.927.067	5.776.927.067
34	Kab. Musi Rawas Utara	6.846.428.767	6.846.428.767	6.846.428.767	6.846.428.767
35	Prov. Bengkulu	48.468.690.614	48.468.690.614	48.468.690.614	48.468.690.614
36	Kab. Rejang Lebong	10.942.045.049	10.942.045.049	10.942.045.049	10.942.045.049
37	Kab. Mukomuko	9.056.270.627	9.056.270.627	9.056.270.627	9.056.270.627
38	Prov. Lampung	59.827.200.607	59.827.200.607	59.827.200.607	59.827.200.607
39	Kab. Pringsewu	11.462.973.439	11.462.973.439	11.462.973.439	11.462.973.439
40	Prov. Jawa Barat	56.448.846.306	56.448.846.306	56.448.846.306	56.448.846.306
41	Kab. Bekasi	53.120.084.137	53.120.084.137	53.120.084.137	53.120.084.137
42	Kab. Bogor	86.810.352.822	86.810.352.822	86.810.352.822	86.810.352.822
43	Kab. Garut	81.873.166.763	81.873.166.763	81.873.166.763	81.873.166.763
44	Kab. Karawang	56.615.420.002	56.615.420.002	56.615.420.002	56.615.420.002
45	Kab. Subang	59.100.220.746	59.100.220.746	59.100.220.746	59.100.220.746
46	Kab. Sukabumi	57.787.064.899	57.787.064.899	57.787.064.899	57.787.064.899
47	Kab. Tasikmalaya	66.449.330.376	66.449.330.376	66.449.330.376	66.449.330.376
48	Kota Bandung	75.705.518.011	75.705.518.011	75.705.518.011	75.705.518.011
49	Kota Bekasi	44.675.997.886	44.675.997.886	44.675.997.886	44.675.997.886
50	Kota Bogor	21.893.097.971	21.893.097.971	21.893.097.971	21.893.097.971
51	Kota Depok	39.195.017.607	39.195.017.607	39.195.017.607	39.195.017.607
52	Kota Tasikmalaya	28.753.792.281	28.753.792.281	28.753.792.281	28.753.792.281
53	Prov. Jawa Tengah	84.190.668.921	84.190.668.921	84.190.668.921	84.190.668.921
54	Kab. Banjarnegara	26.525.266.358	26.525.266.358	26.525.266.358	26.525.266.358
55	Kab. Banyumas	63.306.377.442	63.306.377.442	63.306.377.442	63.306.377.442
56	Kab. Cilacap	62.679.708.698	62.679.708.698	62.679.708.698	62.679.708.698
57	Kab. Demak	24.678.432.630	24.678.432.630	24.678.432.630	24.678.432.630
58	Kab. Kendal	26.425.037.127	26.425.037.127	26.425.037.127	26.425.037.127

No.	Nama Daerah	Penundaan DAU Bulan September	Penundaan DAU Bulan Oktober	Penundaan DAU Bulan November	Penundaan DAU Bulan Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59	Kab. Klaten	33.622.740.902	33.622.740.902	33.622.740.902	33.622.740.902
60	Kab. Magelang	29.304.757.024	29.304.757.024	29.304.757.024	29.304.757.024
61	Kab. Pati	43.727.338.302	43.727.338.302	43.727.338.302	43.727.338.302
62	Kab. Pemalang	43.379.967.030	43.379.967.030	43.379.967.030	43.379.967.030
63	Kab. Purbalingga	24.371.367.910	24.371.367.910	24.371.367.910	24.371.367.910
64	Kab. Purworejo	34.068.258.478	34.068.258.478	34.068.258.478	34.068.258.478
65	Kab. Rembang	28.440.881.260	28.440.881.260	28.440.881.260	28.440.881.260
66	Kab. Sukoharjo	33.410.848.153	33.410.848.153	33.410.848.153	33.410.848.153
67	Kab. Tegal	31.562.269.255	31.562.269.255	31.562.269.255	31.562.269.255
68	Kab. Wonosobo	22.852.311.816	22.852.311.816	22.852.311.816	22.852.311.816
69	Kota Magelang	8.110.040.635	8.110.040.635	8.110.040.635	8.110.040.635
70	Kota Pekalongan	8.276.178.990	8.276.178.990	8.276.178.990	8.276.178.990
71	Kota Salatiga	12.386.954.232	12.386.954.232	12.386.954.232	12.386.954.232
72	Kota Semarang	54.849.254.322	54.849.254.322	54.849.254.322	54.849.254.322
73	Prov. DI Yogyakarta	34.070.329.346	34.070.329.346	34.070.329.346	34.070.329.346
74	Kab. Bantul	36.206.124.106	36.206.124.106	36.206.124.106	36.206.124.106
75	Kab. Gunung Kidul	34.583.173.507	34.583.173.507	34.583.173.507	34.583.173.507
76	Kab. Sleman	18.365.537.582	18.365.537.582	18.365.537.582	18.365.537.582
77	Prov. Jawa Timur	75.724.610.010	75.724.610.010	75.724.610.010	75.724.610.010
78	Kab. Bangkalan	18.328.091.835	18.328.091.835	18.328.091.835	18.328.091.835
79	Kab. Blitar	30.649.956.051	30.649.956.051	30.649.956.051	30.649.956.051
80	Kab. Bondowoso	25.166.021.429	25.166.021.429	25.166.021.429	25.166.021.429
81	Kab. Jember	61.920.087.710	61.920.087.710	61.920.087.710	61.920.087.710
82	Kab. Kediri	56.230.891.337	56.230.891.337	56.230.891.337	56.230.891.337
83	Kab. Mojokerto	35.893.463.062	35.893.463.062	35.893.463.062	35.893.463.062
84	Kab. Nganjuk	29.296.980.189	29.296.980.189	29.296.980.189	29.296.980.189
85	Kab. Ngawi	28.740.553.291	28.740.553.291	28.740.553.291	28.740.553.291
86	Kab. Pasuruan	32.608.179.256	32.608.179.256	32.608.179.256	32.608.179.256
87	Kab. Ponorogo	19.239.574.172	19.239.574.172	19.239.574.172	19.239.574.172
88	Kab. Sampang	29.982.525.586	29.982.525.586	29.982.525.586	29.982.525.586
89	Kab. Sidoarjo	44.370.199.538	44.370.199.538	44.370.199.538	44.370.199.538
90	Kab. Tuban	28.429.579.457	28.429.579.457	28.429.579.457	28.429.579.457
91	Kab. Tulungagung	42.461.656.489	42.461.656.489	42.461.656.489	42.461.656.489

No.	Nama Daerah	Penundaan DAU Bulan September	Penundaan DAU Bulan Oktober	Penundaan DAU Bulan November	Penundaan DAU Bulan Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
92	Kota Kediri	11.185.798.085	11.185.798.085	11.185.798.085	11.185.798.085
93	Kota Madiun	9.259.177.421	9.259.177.421	9.259.177.421	9.259.177.421
94	Kota Pasuruan	7.823.608.735	7.823.608.735	7.823.608.735	7.823.608.735
95	Kota Probolinggo	17.027.750.419	17.027.750.419	17.027.750.419	17.027.750.419
96	Kota Surabaya	55.830.270.046	55.830.270.046	55.830.270.046	55.830.270.046
97	Prov. Kalimantan Barat	67.604.236.194	67.604.236.194	67.604.236.194	67.604.236.194
98	Kab. Ketapang	41.030.311.126	41.030.311.126	41.030.311.126	41.030.311.126
99	Kab. Sanggau	15.059.794.098	15.059.794.098	15.059.794.098	15.059.794.098
100	Kab. Kubu Raya	14.250.881.309	14.250.881.309	14.250.881.309	14.250.881.309
101	Prov. Kalimantan Tengah	58.612.766.713	58.612.766.713	58.612.766.713	58.612.766.713
102	Kab. Katingan	25.665.892.248	25.665.892.248	25.665.892.248	25.665.892.248
103	Kab. Sukamara	7.750.546.606	7.750.546.606	7.750.546.606	7.750.546.606
104	Kab. Murung Raya	24.572.412.069	24.572.412.069	24.572.412.069	24.572.412.069
105	Prov. Kalimantan Selatan	35.285.683.110	35.285.683.110	35.285.683.110	35.285.683.110
106	Kab. Banjar	26.149.015.949	26.149.015.949	26.149.015.949	26.149.015.949
107	Kab. Hulu Sungai Utara	13.371.301.709	13.371.301.709	13.371.301.709	13.371.301.709
108	Kab. Kotabaru	22.838.801.479	22.838.801.479	22.838.801.479	22.838.801.479
109	Kab. Tabalong	13.659.802.195	13.659.802.195	13.659.802.195	13.659.802.195
110	Kab. Tanah Laut	24.359.639.891	24.359.639.891	24.359.639.891	24.359.639.891
111	Kota Banjarbaru	15.796.217.065	15.796.217.065	15.796.217.065	15.796.217.065
112	Prov. Kalimantan Timur	3.775.970.942	3.775.970.942	3.775.970.942	3.775.970.942
113	Kab. Berau	24.585.229.976	24.585.229.976	24.585.229.976	24.585.229.976
114	Kab. Kutai Timur	19.864.229.274	19.864.229.274	19.864.229.274	19.864.229.274
115	Kab. Mahakam Ulu	17.351.015.670	17.351.015.670	17.351.015.670	17.351.015.670
116	Prov. Sulawesi Utara	38.586.425.528	38.586.425.528	38.586.425.528	38.586.425.528
117	Kota Bitung	8.743.004.303	8.743.004.303	8.743.004.303	8.743.004.303
118	Kab. Banggai	39.575.960.250	39.575.960.250	39.575.960.250	39.575.960.250
119	Kab. Banggai Kepulauan	13.848.770.959	13.848.770.959	13.848.770.959	13.848.770.959
120	Kab. Luwu	12.477.078.449	12.477.078.449	12.477.078.449	12.477.078.449
121	Kab. Pangkajene Kepulauan	12.703.995.663	12.703.995.663	12.703.995.663	12.703.995.663
122	Kab. Luwu Timur	19.938.134.655	19.938.134.655	19.938.134.655	19.938.134.655
123	Kab. Tana Toraja	15.073.810.967	15.073.810.967	15.073.810.967	15.073.810.967
124	Prov. Sulawesi Tenggara	54.347.978.073	54.347.978.073	54.347.978.073	54.347.978.073

No.	Nama Daerah	Penundaan DAU Bulan September	Penundaan DAU Bulan Oktober	Penundaan DAU Bulan November	Penundaan DAU Bulan Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
125	Kab. Buton	7.739.869.883	7.739.869.883	7.739.869.883	7.739.869.883
126	Kab. Konawe	12.494.245.565	12.494.245.565	12.494.245.565	12.494.245.565
127	Kota Bau-bau	14.071.822.330	14.071.822.330	14.071.822.330	14.071.822.330
128	Kab. Konawe Selatan	12.071.444.169	12.071.444.169	12.071.444.169	12.071.444.169
129	Kab. Konawe Kepulauan	8.493.266.752	8.493.266.752	8.493.266.752	8.493.266.752
130	Kab. Muna Barat	10.640.369.778	10.640.369.778	10.640.369.778	10.640.369.778
131	Kab. Buton Tengah	6.547.602.948	6.547.602.948	6.547.602.948	6.547.602.948
132	Prov. Bali	38.482.678.554	38.482.678.554	38.482.678.554	38.482.678.554
133	Kab. Badung	15.220.412.229	15.220.412.229	15.220.412.229	15.220.412.229
134	Kab. Karangasem	13.271.354.097	13.271.354.097	13.271.354.097	13.271.354.097
135	Kota Denpasar	29.956.840.069	29.956.840.069	29.956.840.069	29.956.840.069
136	Prov. Nusa Tenggara Barat	40.474.798.855	40.474.798.855	40.474.798.855	40.474.798.855
137	Kab. Sumbawa	22.549.774.063	22.549.774.063	22.549.774.063	22.549.774.063
138	Kota Mataram	22.054.228.904	22.054.228.904	22.054.228.904	22.054.228.904
139	Kab. Lombok Utara	7.210.140.795	7.210.140.795	7.210.140.795	7.210.140.795
140	Prov. Nusa Tenggara Timur	60.524.878.348	60.524.878.348	60.524.878.348	60.524.878.348
141	Kab. Ende	11.538.089.786	11.538.089.786	11.538.089.786	11.538.089.786
142	Kab. Kupang	25.466.413.828	25.466.413.828	25.466.413.828	25.466.413.828
143	Kab. Sumba Timur	11.532.251.253	11.532.251.253	11.532.251.253	11.532.251.253
144	Kab. Manggarai Barat	18.071.885.782	18.071.885.782	18.071.885.782	18.071.885.782
145	Kab. Maluku Tengah	17.700.989.705	17.700.989.705	17.700.989.705	17.700.989.705
146	Kab. Maluku Tenggara	13.249.651.594	13.249.651.594	13.249.651.594	13.249.651.594
147	Kab. Maluku Barat Daya	20.078.957.027	20.078.957.027	20.078.957.027	20.078.957.027
148	Kab. Merauke	55.812.764.440	55.812.764.440	55.812.764.440	55.812.764.440
149	Kab. Mimika	28.119.201.506	28.119.201.506	28.119.201.506	28.119.201.506
150	Kab. Pegunungan Bintang	23.245.513.747	23.245.513.747	23.245.513.747	23.245.513.747
151	Kab. Boven Digoel	22.781.113.517	22.781.113.517	22.781.113.517	22.781.113.517
152	Kab. Halmahera Tengah	8.023.391.031	8.023.391.031	8.023.391.031	8.023.391.031
153	Prov. Banten	31.389.605.500	31.389.605.500	31.389.605.500	31.389.605.500
154	Kab. Pandeglang	32.183.921.642	32.183.921.642	32.183.921.642	32.183.921.642
155	Kab. Tangerang	54.167.305.947	54.167.305.947	54.167.305.947	54.167.305.947
156	Kota Cilegon	21.944.379.704	21.944.379.704	21.944.379.704	21.944.379.704
157	Kota Tangerang	39.906.567.538	39.906.567.538	39.906.567.538	39.906.567.538
158	Kota Serang	17.599.054.957	17.599.054.957	17.599.054.957	17.599.054.957
159	Kota Tangerang Selatan	26.322.476.351	26.322.476.351	26.322.476.351	26.322.476.351
160	Prov. Bangka Belitung	32.791.682.285	32.791.682.285	32.791.682.285	32.791.682.285

No.	Nama Daerah	Penundaan DAU Bulan September	Penundaan DAU Bulan Oktober	Penundaan DAU Bulan November	Penundaan DAU Bulan Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
161	Prov. Gorontalo	24.024.266.007	24.024.266.007	24.024.266.007	24.024.266.007
162	Kab. Gorontalo	24.106.199.259	24.106.199.259	24.106.199.259	24.106.199.259
163	Prov. Kepulauan Riau	15.694.841.453	15.694.841.453	15.694.841.453	15.694.841.453
164	Kab. Karimun	6.978.893.684	6.978.893.684	6.978.893.684	6.978.893.684
165	Kab. Lingga	7.471.603.323	7.471.603.323	7.471.603.323	7.471.603.323
166	Kab. Bintan	8.144.914.147	8.144.914.147	8.144.914.147	8.144.914.147
167	Prov. Sulawesi Barat	16.751.114.673	16.751.114.673	16.751.114.673	16.751.114.673
168	Prov. Kalimantan Utara	46.735.356.720	46.735.356.720	46.735.356.720	46.735.356.720
169	Kab. Tana Tidung	16.228.485.276	16.228.485.276	16.228.485.276	16.228.485.276

JUMLAH PROVINSI	1.183.913.211.797	1.183.913.211.797	1.183.913.211.797	1.183.913.211.797
JUMLAH KAB./KOTA	3.670.830.554.323	3.670.830.554.323	3.670.830.554.323	3.670.830.554.323
JUMLAH NASIONAL	4.854.743.766.120	4.854.743.766.120	4.854.743.766.120	4.854.743.766.120

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001